

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berbicara mengenai dinamika politik disuatu bangsa tidak akan terlepas dari eksistensi partai politik di dalamnya dengan berbagai *platform* yang ditampilkan. Secara konseptual partai politik adalah suatu kelompok yang dimana para anggota partai politik memiliki orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok. Partai politik juga sebagai institusi dimana warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan negara. Mengkaji tentang partai politik merupakan suatu bahasan menarik yang senantiasa diajukan, sebab menjelang pemilihan umum setiap partai politik bermanuver untuk menarik simpati dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Visi dan misi disampaikan secara transparan kepada masyarakat beserta dengan menawarkan janji-janji politik. Ideologi partai politik terpampang jelas diberbagai tempat dalam bentuk baliho lengkap dengan foto pimpinan partai politik atau kandidat yang diusung oleh partai politik. Bahkan untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat tersebut partai politik menampilkan tokoh politik tertentu.

Keberadaan partai politik di negara demokrasi sangat "...dibutuhkan oleh suatu negara, karena partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Budiardjo, 2008, hlm. 397). Di Indonesia partai politik tumbuh subur dengan berbagai *platform* yang ditawarkan sehingga partai politik dapat "... menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan penguasa" (Rosit dan Hidayat, 2019, hlm. 179).

Partai politik memiliki salah satu fungsi strategis, yaitu kaderisasi atau rekrutmen politik selain fungsi-fungsi komunikasi politik dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kaderisasi sebagai suatu proses seleksi kader partai politik yang nantinya akan menjadi calon pemimpin yang diusulkan oleh partai

dalam pemilihan umum. Proses seleksi kader yang dilakukan oleh partai politik akan menjadi parameter tercapai atau tidaknya sistem politik yang telah dibangun yang berdampak pada kualitas proses kaderisasi tersebut. Menurut Heryanto (2011, hlm. 46) bahwa kaderisasi "... sangat penting bagi kelangsungan sistem politik karena tanpa elit politik yang mampu melaksanakan peranannya maka kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Kaderisasi pada esensinya adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan", sebab individu-individu yang akan menjadi kader partai tersebut "... memiliki kewajiban dan tugas untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan politik" (Septiawan dan Winarno, 2017, hlm. 119).

Dalam perihal rekrutmen kader partai saat ini tidak sedikit kekhawatiran muncul terhadap sistem rekrutmen yang diterapkan oleh partai politik. Asas keterbukaan dan transparan dalam rekrutmen kader partai seolah tidak dijalankan sehingga berdampak kepada pemilihan kader partai yang kurang objektif. Bahkan sebagian partai politik "... mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri, sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotisme. Meskipun ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, namun dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh pimpinan parpol" (Syamsuddin Haris dkk, 2016, hlm. 40). Keberperanan masyarakat sebagai pengawas jalannya proses seleksi kader partai yang dilakukan oleh suatu partai politik menjadi tidak terlihat. Apabila merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 terutama dalam pasal 29 ayat (2) yang berkaitan dengan rekrutmen politik bahwa "rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan". Hal tersebut dilakukan agar kader-kader yang dimiliki oleh partai politik tidak terkesan instan, dalam artian kader partai politik yang kurang berkualitas dari segi kapabilitas, integritas, dan kepemimpinan sebagai kader partai, karena tidak melalui proses pembinaan literasi politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada problematika kaderisasi kader partai politik di atas, maka muncul suatu kekhawatiran dalam benak masyarakat bahwa partai politik dijadikan sebuah kendaraan politik oleh individu-individu untuk sebatas meraih kekuasaan

sehingga dapat mereduksi arti penting keberadaan partai politik itu sendiri. Keadaan partai politik di negara demokrasi saat ini yang pada awalnya menjadi penggerak ide dan gagasan baru untuk mendukung kemakmuran rakyat, kini telah berganti menjadi arena kompetisi kader partai politik untuk memperoleh kedudukan. Partai politik pada mulanya menjadi jembatan harapan lahirnya pemimpin-pemimpin negara yang berkualitas telah berganti menjadi arena kompetisi kalangan eksternal untuk menunggu dipinang dan dicalonkan menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif, maka bukan merupakan sebuah persoalan yang mengherankan ketika *image* partai politik dan kader partai di mata publik menjadi negatif.

Orientasi partai politik hanya berhenti pada level memperoleh kekuasaan, padahal tidak demikian, partai politik mustinya menggunakan kekuasaan yang telah diperoleh tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dalam artian lain adanya semangat pengabdian kepada masyarakat. Disisi lain adanya sekat antara partai politik dengan masyarakat sehingga menimbulkan jarak atau kesenjangan. Jarak yang begitu lebar akan membuat masyarakat berfikir bahwa mereka bisa hidup tanpa adanya peran aktif dari kader partai dan partai politik. Kekecewaan yang mendalam tersebut membuat masyarakat merasa tidak pernah diperhatikan dan diurus oleh partai politik, terutama pasca pesta demokrasi selesai. Persoalan tersebut tentu akan berdampak kepada menurunnya angka partisipasi politik masyarakat, terutama partisipasi politik dari kalangan generasi muda yang nantinya sebagai cerminan meningkatnya jumlah golput. Belum lagi dengan adanya kader partai politik yang melakukan tindakan melanggar hukum.

Dengan citra partai politik tersebut, seharusnya partai politik berbenah untuk mengembalikan fungsi partai politik sesungguhnya. Apabila merujuk kepada fungsi partai politik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 pasal 11 tahun 2011 tentang fungsi partai politik bahwa partai politik mengemban beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan menurut gagasan Miriam Budiardjo (2008, hlm. 405-409) bahwa terdapat empat fungsi partai politik, sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik
Partai politik bertindak sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia politik. Jika dilihat dari segi ini, tugas yang dimiliki partai politik adalah sebagai penyalur berbagai macam pendapat dan aspirasi dari masyarakat guna menghasilkan tujuan yang sama.
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik
Sosialisasi politik merupakan usaha untuk mentransmisikan budaya politik dalam upaya membentuk sikap dan orientasi setiap anggota masyarakat selaku warga negara atau dengan kata lain, ini merupakan suatu pendidikan politik, dimana partai politik merupakan struktur penting dalam menanamkan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat.
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik
Partai politik ikut serta dalam upaya memperluas partisipasi politik bagi warga negara, dimana ia merupakan suatu wahana untuk dapat melakukan penyeleksian kader-kader yang nantinya akan memimpin negara pada tingkat maupun posisi jabatan tertentu, yaitu dengan berusaha melakukan pencarian serta mengajak warga negara yang memiliki bakat untuk menjadi anggota partai politik untuk ikut serta dalam kegiatan partai.
- d. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*)
Adalah suatu hal yang wajar apabila terjadi persaingan maupun beda pendapat yang terjadi pada masyarakat dalam suatu sistem demokrasi, dimana nilai-nilai dan kepentingan yang tumbuh dalam suatu lingkungan masyarakat memiliki berbagai keanekaragaman, rumit, serta cenderung terjadi persaingan antara satu dengan yang lainnya.

Dengan keberadaan partai politik yang dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal dalam melakukan rekrutmen kader-kader partai politik sebagai calon pemimpin atau proses pembinaan peningkatan literasi politik yang bermutu. “Partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wadah wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan

penguasa (Rosit dan Hidayat, 2019, hlm. 177). Sehingga tujuan murni adanya partai politik dapat tercapai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 pasal 10 Tahun 2011 tentang partai politik yang meliputi:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan optimal dan partai politik dapat menghasilkan kader-kader politik yang memiliki, 1) keluasaan pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap problematika atau isu-isu politis, 2) peningkatan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 3) dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa, 4) kader politik bisa membangun masyarakat madani dimana kader politik itu bermasyarakat.

Sekaitan dengan proses kaderisasi yang merupakan bagian dari kebijakan partai politik untuk merekrut kader partai politik. Menurut Rosit dan Hidayat (2019, hlm. 179) terdapat beberapa alasan mendasar tentang menariknya proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang dianggap sebagai cerminan dari dinamika partai politik, yaitu:

- a. Kandidasi dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Apakah kekuasaan partai politik bersifat oligarkhis atau bersifat menyebar. Dengan kata lain, kekuasaan terkonsentrasi di pimpinan atau elit partai atau tersebar ke dalam struktur hierarki partai, lembaga-lembaga partai, faksi-faksi internal partai sampai pada anggota partai.
- b. Kandidasi dapat menggambarkan perjuangan kekuasaan internal partai. Perjuangan faksi-faksi politik di dalam partai akan sangat nampak dalam rekrutmen politik. Kandidasi menjadi pertarungan eksistensi individu dan

- faksi-faksi politik di partai, dan secara bersamaan menjadi pintu masuk yang penting untuk dapat mengakses kekuasaan di arena yang lebih luas.
- c. Kandidasi dapat menunjukkan politik representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik. Individu-individu yang direkrut oleh partai pada hakekatnya merepresentasikan kolektivitas entitas tertentu, seperti demografis, geografis, *sex*, ideologi, dan sebagainya.
 - d. Kandidasi menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Kita dapat mengetahui apakah sirkulasi elit itu mengacu pada proses dimana individu-individu berputar di antara elit dan non-elit.
 - e. Kandidasi menampilkan wajah partai di ruang publik. Partai politik tidak akan lepas dari *image* politik di ruang publik. Proses kandidasi akan selalu terekam di benak publik dalam memosisikan *image* partai politik.

Kaderisasi atau rekrutmen kader partai politik menjadi hal penting untuk proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik dalam menyerap calon kader partai guna meregenerasi kepemimpinan di internal partai politik. Tanpa adanya kaderisasi, sebuah partai politik tidak dapat bergerak dan melakukan fungsinya dengan baik. Kaderisasi juga merupakan transfer pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan. Menurut Rosyidin (2019, hlm. 120) “jika partai politik merekrut calon-calon kader yang berkualitas, dilakukan melalui seleksi yang ketat atau tidak asal rekrut, tentu partai politik akan dipenuhi oleh sumber daya-sumber daya (SDM) yang handal. Keberadaan mereka jelas akan sangat membantu performa partai politik itu sendiri sehingga kontribusinya, baik terhadap negara maupun rakyat atau konstituen akan maksimal”.

Dalam proses rekrutmen kader partai politik, setiap partai politik memiliki model kaderisasi tersendiri untuk menyerap kader partai politik yang berkualitas. Model kaderisasi yang pertama adalah melalui anggota partai politik yang sebelumnya telah terdaftar sebagai anggota dan membayar iuran keanggotaan partai yang tentu akan mendapatkan pendidikan dasar politik. Kemudian melalui non anggota partai politik atau disebut sebagai organisasi sayap partai. Melalui organisasi sayap partai pengenalan dan penanaman ideologi partai politik lebih mudah dilakukan, sebab organisasi sayap partai memberikan peran penting dalam mensosialisasikan program dan kebijakan unggulan partai.

Sekaitan dengan organisasi sayap partai di Indonesia yang dibentuk oleh partai politik untuk menyerap calon kader partai politik dapat dicermati pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Organisasi Sayap Partai Indonesia

No	Kelompok Sosial	Partai Politik			
		PDIP	GOLKAR	PKS	Partai DEMOKRAT
1	Pemuda	Banteng Muda Indonesia (BMI)	Barisan Muda Tri Karya Golkar. Barisan Muda Partai Golkar (BMPG).	Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS)	Angkatan Muda Demokrat (AMD) Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB)
2	Mahasiswa	Taruna Merah Putih (TMP)	Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	Gerakan Mahasiswa Merah Putih (Gema MP)
3	Wanita	-	Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)	Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)
4	Profesi	Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI)	Kosgoro 1957 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).	Serikat Pekerja Keadilan (SPK) Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) <i>Central for Indonesian Reform (CIR)</i>	Gerakan Cendekiawan Demokrat (GCD)
5	Agama	Baitul Muslimin	Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah, Pengajian Al-Hidayah	Kelompok Tarbiyah	Ikhwanul Mubalighin
6	Relawan	Relawan Perjuangan Demokrasi Indonesia (Repdem)	Relawan Beringin	Relawan Indonesia (<i>Indonesia Volunteer</i>)	Relawan Biru Indonesia (RBI)

Sumber: Syamsuddin Haris dkk, 2016, hlm. 52

Apabila mencermati gagasan Hamid (2008, hlm. 14) tentang sumber kader partai politik bahwa partai politik dapat menyerap kader partai melalui “*Pertama*”, dari partai politik melalui pendidikan dasar politik dan even-even, seperti pentas

kesenian, kerja bakti untuk bencana alam dan diskusi kelompok. *Kedua*, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untuk menjangkau calon kader maupun ormas sebagai *underbow* partai, terutama dari generasi muda yang potensial. *Ketiga*, dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat yang seideologi dengan partai”. Oleh sebab itu, dalam proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka merekrut calon kader partai politik dapat dilakukan secara optimal apabila berpegang teguh pada prinsip-prinsip kaderisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syamsuddin Haris dkk (2016, hlm. 52) sebagai berikut:

- a. Terbuka. Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kaderisasi perlu disertai jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota partai politik maupun anggota sayap partai yang memiliki potensi dan/ atau dengan penilaian lain yang telah ditentukan oleh partai politik yang sifatnya demokratis dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi.
- b. *Non-Diskriminatif*. Pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan/atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip non-diskriminatif dalam kaderisasi sekaligus dapat mengurangi oligarkhi parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu legislatif, kepala daerah dan presiden/wakil presiden serta pemilihan kader-kader partai di jabatan publik lainnya.
- c. Berjenjang. Penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan proses rekrutmen kader partai politik yang merupakan bagian dari fungsi partai politik bahwa partai politik musti menerapkan pendekatan literasi politik dalam proses pembinaan kader partai, sebab peningkatan kapasitas kader partai akan menjadi parameter keberhasilan partai politik dalam melaksanakan literasi politik itu sendiri. Literasi politik juga penting sebagai upaya mewujudkan proses pembinaan kader partai yang optimal untuk menciptakan kader-kader partai yang berkualitas yang nantinya dipersiapkan untuk

menduduki jabatan publik atau regenerasi kepemimpinan diinternal partai politik. Urgensi kegiatan literasi politik dilakukan “*pertama*, kegiatan literasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam penguatan dan pemberdayaan politik warga negara, terutama dalam mengedukasi hak-hak politik warga negara sehingga memahami benar posisinya di antara berbagai kekuatan politik yang ada. *Kedua*, kegiatan literasi politik kerap direduksi oleh berbagai faktor antara lain desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif, kontestasi pada kekuasaan legislatif, kartelisasi politik dan praktik demokrasi kolusif, serta menguatnya distorsi politik media. *Ketiga*, literasi politik itu bukanlah sebatas wacana (*discourse*). Melainkan, perpaduan antara pengetahuan yang memadai, keterampilan dalam pencarian dan komparasi informasi politik, sekaligus juga sikap politik mereka terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara“ (Heryanto, 2011, hlm. 194-195).

Literasi politik dalam konteks ini dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana memberikan a) Pemahaman akan empat pilar kebangsaan dan bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), b) Pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam membudayakan etika dan budaya politik, c) Proses pengkaderan kader politik secara berjenjang dan berkelanjutan, dan d) Memberikan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi kepada seluruh kader partai politik.

Partai politik Golkar sendiri terkenal sebagai partai kaderisasi dalam artian mengutamakan pendidikan kader-kadernya untuk terus berkembang dari mulai pengurus kecamatan hingga menjadi anggota legislatif. Selain itu partai Golkar memiliki infrastruktur dari pusat hingga daerah bahkan terdistribusi ke tingkat desa. Dengan infrastuktur yang tersebar dan kader partai yang cukup banyak tersebut partai politik Golkar memiliki peran penting sebagai lembaga pendidikan politik dalam menerapkan secara konsisten kegiatan literasi politik di internal partai. Penyelenggaraan literasi politik tersebut akan berkaitan dengan bagaimana dapat mencetak kader partai yang militan, tidak plin-plan sehingga berpindah partai, simpati terhadap kehidupan masyarakat serta mampu meningkatkan daya nalar atau daya tangkap kader partai terhadap permasalahan politik yang terjadi.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pembinaan Kader Politik Melalui Literasi Politik Pemuda (Studi Kasus pada Partai Politik Golkar Kabupaten Cianjur)“. Penelitian ini menjadi penting karena, konsepsi pembinaan kader politik melalui literasi politik pemuda dapat menjadi strategi atau model pembinaan kader di internal partai politik itu sendiri, sebab pada dasarnya kader politik adalah warga negara yang perlu pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan. Apabila kegiatan literasi politik tidak dilakukan maka dapat berdampak pada persoalan yang dapat mempengaruhi kapabilitas kader partai sebagai tokoh politik masyarakat, idealisme kader partai yang kontra dengan ideologi partai, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kader partai, karena tidak kompeten dalam menjembatani aspirasi masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas yang dapat berakibat kepada penjelasan yang bersifat tidak mendalam, maka diperlukan fokus penelitian. Fokus penelitian tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mengarahkan peneliti agar fokus kepada persoalan yang akan diteliti dan sebagai batasan penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Urgensi literasi politik pemuda dalam pembinaan kader partai.
- b. Program kegiatan literasi politik pemuda dalam pembinaan kader partai.
- c. Implikasi dari pelaksanaan literasi politik pemuda dalam pembinaan kader partai.
- d. Hambatan dan upaya strategis yang dilakukan dalam pembinaan kader partai melalui literasi politik pemuda.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, berikut akan disajikan beberapa sub masalah pokok sebagai rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian disajikan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Mengapa pembinaan kader politik melalui literasi politik pemuda sangat penting dilakukan?
- b. Bagaimana program pembinaan yang dilakukan dalam membina kader politik melalui literasi politik pemuda?
- c. Bagaimana implikasi dari pembinaan yang dilakukan terhadap kader politik melalui literasi politik pemuda?
- d. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan upaya strategis yang dilakukan dalam pembinaan kader politik melalui literasi politik pemuda?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis tentang pembinaan kader politik melalui literasi politik pemuda.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Menggali, mengkaji, dan menganalisis serta memaparkan urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik pemuda.
- b. Mengkaji, menganalisis, dan memaparkan program pembinaan kader politik melalui literasi politik pemuda.
- c. Mengkaji, menganalisis, dan memaparkan implikasi dari implementasi literasi politik dalam membina kader politik pemuda.
- d. Mengkaji, menganalisis, dan memaparkan hambatan yang dihadapi dan upaya strategis yang dilakukan dalam membina kader politik melalui literasi politik pemuda.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan:

1.5.1 Segi Teori

Secara akademis (keilmuan) diharapkan penelitian tentang Pembinaan Kader Politik Melalui Literasi Politik Pemuda (Studi Kasus pada Partai Politik GOLKAR

Kabupaten Cianjur) dapat menjadi referensi keilmuan untuk menelaah, merumuskan, sampai pada mengembangkan konsep tentang literasi politik pemuda dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5.2 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan sebagai sarana edukasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk memahami urgensi pembinaan kader politik dan literasi politik dengan melibatkan institusi pendidikan formal dan non-formal sebagai wujud praktik Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5.3 Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi pemuda sebagai *agent of social change* untuk ikut berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat untuk memberikan sejumlah pemahaman tentang pentingnya literasi politik.

1.5.4 Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, yaitu:

- a. Diketuinya literasi politik pemuda penting dilakukan dalam membina kader politik.
- b. Diketuinya program literasi politik pemuda dalam membina kader politik.
- c. Diketuinya implikasi dari implementasi literasi politik pemuda dalam membina kader politik.
- d. Diketuinya hambatan yang dihadapi dan upaya strategis yang dilakukan dalam membina kader politik melalui literasi politik pemuda.